

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara negara merupakan bentuk komunikasi dalam studi Hubungan Internasional. Tetapi dengan berjalannya waktu, studi hubungan internasional mengalami dinamika. Artinya sifat dari studi Hubungan Internasional dinamis. Sebelum berakhirnya Perang Dingin, isu politik dan keamanan lebih dominan diantara isu – isu yang lainnya. Selain itu, sifat studi Hubungan Internasional pada masa tersebut yaitu *bipolar* dan *state centric*. Tetapi pasca Perang Dingin, isu – isu tersebut ikut bergeser misalnya masuknya isu ekonomi, gender, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan isu lainnya.

Salah satu agenda baru dan juga tidak bisa diabaikan pada era saat ini yaitu isu lingkungan hidup dalam hubungan internasional. Hal tersebut dikarenakan isu lingkungan hidup sangat kompleks dan dinamis. Dikatakan kompleks karena isu lingkungan hidup melibatkan banyak aspek. Akan banyak permasalahan yang timbul dalam isu lingkungan hidup seperti masalah perbatasan, pencemaran, kerusakan sumber daya alam, dll. Lalu masalah lingkungan hidup tersebut dapat menimbulkan sebuah komunikasi yang interaktif dalam sebuah kerjasama maupun sebuah konflik. Dikatakan dinamis karena keadaan alam terus berubah seiring berjalannya waktu sehingga hal tersebut dapat merubah isi dari isu lingkungan hidup.

Salah satu isu lingkungan hidup yang tidak bisa dihilangkan yaitu *waste management*. *Waste management* atau pengelolaan sampah merupakan salah satu agenda penting setiap negara. Dalam hubungan internasional, *waste management* merupakan isu yang mendesak saat ini. Jika sebuah negara membuat *waste management* yang tertata baik dan tidak berdampak buruk maka keberlangsungan hidup di dalam negara tersebut akan terus ada. Pada nyatanya, dunia membutuhkan lebih dari satu negara yang memberlakukan *waste management* yang baik karena ancaman yang ada di dalam isu *waste management* tidak hanya melibatkan satu negara saja dan pasti banyak negara yang mempunyai masalah yang sama.

Permasalahan sampah menjadi fokus saat ini bagi negara – negara di dunia karena akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Ancaman tersebut meliputi kerusakan lingkungan hidup baik di darat, laut maupun udara. Ketiga hal tersebut merupakan aspek utama kehidupan manusia di dunia. Maka dari itu banyak negara yang melakukan kerjasama untuk mengatasi masalah sampah. Isu *waste management* membuat negara – negara di dunia mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk segera diatasi.

Secara tidak langsung isu *waste management* dalam hubungan internasional sudah ada sejak lama, karena permasalahan sampah merupakan permasalahan dunia internasional terlebih lagi saat adanya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto dihasilkan dalam pertemuan ketiga Conference of Parties (COP) UNFCCC pada tanggal 11 Desember 1997 di Kota Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005 (Utama, 2014). Garis besar isi perjanjian tersebut yaitu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk negara – negara industri. Seperti yang diketahui bahwa aktivitas industri menghasilkan sampah pabrik. Sampah yang dihasilkan selama ini belum terkelola dengan baik dan bahkan merusak lingkungan dan juga udara. Untuk mendukung pengurangan emisi GRK yang diserukan dalam Protokol Kyoto maka salah satu langkah yang dibutuhkan yaitu pengelolaan sampah atau *waste management*. Proses pengelolaan sampah didominasi oleh gas karbon dioksida (CO₂) dan gas metana (CH₄). Kondisi tersebut berbahaya dikarenakan produksi gas yang dihasilkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah lepas ke atmosfer bumi secara bebas tidak terkendali karena tidak adanya penanganan yang tepat atau yang disebut dengan *open dumping*.

Pentingnya *waste management* bagi suatu negara yaitu untuk memperbaiki keberlangsungan hidup warga negaranya di masa yang akan datang. Karena dampak dari *waste management* yang tidak baik akan merusak kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu karena dapat menghemat energi. Menurut penelitian gas metana mempunyai kekuatan sekitar 21 kali lebih kuat menghasilkan efek rumah kaca dibandingkan dengan karbon dioksida, namun gas metana memiliki potensi lebih besar untuk dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber energi (Yosiyana, 2014). Sehingga negara tersebut bisa saja memanfaatkan energi yang dihasilkan dari *waste*

management. Alasan penting lainnya *waste management* bagi satu negara yaitu mengurangi polusi. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa penerapan *waste management* yang salah seperti open dumping akan menyebabkan banyaknya gas karbondioksida dan gas metana yang dapat menghasilkan polusi dan juga udara yang tidak sehat.

Waste management juga penting bagi satu negara karena dapat menghemat sumber daya alam yang ada. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan akan membuat sumber daya alam tersebut akan habis. Dengan sistem *waste management* penggunaan SDA akan lebih teratur dan ekosistem tidak akan rusak. Sebuah negara akan lebih ekonomis dengan memanfaatkan sistem *waste management* yang baik karena memanfaatkan sampah menjadi energy yang berguna dan penghematan sumber daya alam yang ada.

Salah satu negara yang berkepentingan terhadap isu *waste management* adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat – giatnya beralih menjadi negara industri. Bertumbuhnya perindustrian merupakan permintaan atas gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang ikut berubah. Hal tersebut berdampak yaitu meningkatnya aktivitas usaha dan industri yaitu semakin beratnya pengelolaan sampah dan penanganan limbah hasil usaha dan industri tersebut. Indonesia sedang dalam masa pembangunan di berbagai daerah dengan membuka kegiatan perekonomian. Aktivitas perekonomian tersebut berupa kegiatan industry seperti pertambangan, tekstil, dll. Kegiatan ekonomi yang meningkat dan juga pertumbuhan penduduk yang ikut meningkat mengakibatkan limbah atau sampah ikut meningkat. Peningkatan jumlah sampah tersebut tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang benar sehingga sampah dibiarkan menumpuk di TPA. Permasalahan sampah di Indonesia yaitu masih menggunakan sistem *open dumping*. Dari *open dumping* ini akan menyebabkan *global warming*.

Kepentingan Indonesia atas isu *waste management* bukan tanpa alasan yang pasti. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dalam buku yang berjudul Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 data table 5.2 tentang Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi

tahun 2010 – 2017, bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,34 % pada periode 2010 – 2017. Pertumbuhan penduduk tersebut membuat semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan sampah atau limbah yang dihasilkan semakin tinggi juga. Tetapi pengelolaan sampah belum memadai. Bahkan di dalam buku tersebut dalam table 5.3 tentang Presentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi tahun 2010 – 2035, bahwa Indonesia akan terus mengalami peningkatan sampai dengan 2035 mendatang. Artinya Indonesia berkepentingan untuk mengadakan *waste management* yang memadai dan sepadan dengan produksi sampah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Salah satu permasalahan mengenai *waste management* kota di Indonesia yaitu provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki kota – kota penyangga Jakarta. Kabupaten kota tersebut yaitu Depok, Bekasi, Bogor bahkan Bandung masih terbilang cukup dekat dari Jakarta. Karena ada beberapa kabupaten kota yang menjadi penyangga ibu kota negara, Jawa Barat memiliki permasalahan sampah seperti jumlah penduduk yang banyak dan juga pola konsumsi masyarakat yang ikut bertambah pertumbuhannya. Tidak sampai di situ, timbulan sampah yang ikut meningkat harus diselsaikan dengan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang berbasis 3R, yakni *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Yang harus diperhatikan juga adalah jumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di Jawa Barat. Pada dasarnya TPA menjadi bagian akhir dalam penyelesaian masalah sampah. Jumlah TPA dan juga apakah TPA tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membuat peraturan tentang sistem pengelolaan sampah. Di dalam perda tersebut diatur mengenai sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diberlakukan melalui sistem 3R. Peraturan Daerah tersebut yaitu Perda No. 12 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai TPA yang menjadi permasalahan sampah di Jawa Barat. Pada 2007 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerapkan program 3R. 3R merupakan *Reduce* yang merupakan pengurangan volume atau jumlah dari sampah yang dihasilkan. Kedua yaitu, *Reuse* yaitu penggunaan kembali sampah yang dihasilkan. Terakhir ada

4

Recycle yaitu daur ulang atau mengubah wujud dan bentuk sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menurut UU NO 18 Tahun 2008 tersebut. Prosesnya yaitu dengan memperkenalkan kegiatan 3R dan pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan Undang-Undang NO 18 Tahun 2008 di kota – kota Indonesia. Dalam Pasal 5 dan 6 pemerintah daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

Aspek yang harus dilihat dari permasalahan sampah di Indonesia yang lainnya yaitu tentang TPA. TPA sendiri merupakan tempat pemrosesan akhir sampah yang telah dipilah dari proses 3R. Konsep TPA di Indonesia masih menggunakan metode menimbun sampah, sehingga banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tetapi dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia sadar bahwa TPA sudah tidak bisa lagi digunakan dengan metode tersebut dan membutuhkan metode terbaru dan juga teknologi yang memadai. Melihat kegagalan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah maka JICA menawarkan untuk mengambil peran terkait sistem pengelolaan sampah dan juga perancangan pembangunan TPA. JICA sadar bahwa dengan tugas tersebut, pemerintah daerah hanya memiliki kapasitas terbatas untuk mengembangkan kebijakan dan juga strategi public. Dan tidak memiliki peraturan dan juga rencana dasar. Yang terpenting yaitu JICA berpendapat bahwa pengelolaan sampah harus memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan. Maka dari itu, JICA ikut mengambil bagian dalam menangani permasalahan ini. Selain berdasarkan karena UU NO. 18 Tahun 2008, JICA juga

ingin terus mengembangkan programnya yaitu *support for environment* melalui pengembangan yang dimulai di kota – kota di Indonesia.

Adanya peran JICA dalam mengatasi permasalahan ini tentu saja dilandasi adanya kesepakatan ikatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Jepang sebagai pihak yang memiliki kemampuan secara finansial dan juga sumber daya manusia. Kemampuan finansial tersebut disalurkan melalui ODA Jepang dalam bentuk hibah, pinjaman dana ataupun kerjasama teknis seperti pelatihan. Karena JICA adalah organisasi internasional yang mewakili pemerintah Jepang, maka segala bentuk kebijakan dari JICA secara tidak langsung mengikuti dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Jepang sendiri.

Dengan mengambil bagian dalam proses penyelesaian masalah sampah di Indonesia maka JICA selaku perwakilan Jepang semakin mempererat hubungan kedua negara. JICA memiliki tujuan dalam mengambil bagian dalam permasalahan ini yaitu untuk mempersiapkan perancangan pembangunan TPA serta metode pengelolaan limbah padat 3R secara tepat (untuk limbah rumah tangga dan limbah sejenis rumah tangga); serta merumuskan Rencana Aksi Jangka Menengah untuk Pengurangan Sampah dan melaksanakan UU NO 18 Tahun 2008 tersebut. JICA mengambil bagian dalam proses penyelesaian sampah di Jawa Barat dengan melakukan kerjasama pada 2012. Dalam kerjasama ini JICA mengambil peran dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat dengan membantu merancang pembangunan TPA di Jawa Barat. Harapan dari kerjasama tersebut yaitu JICA bisa membantu Pemda Jawa Barat dalam mengurangi permasalahan sampah terlebih lagi permasalahan TPA. Pembangunan TPA di Jawa Barat tersebut merupakan langkah Pemda dalam mensukseskan program 3R. Tetapi pada nyatanya untuk pembangunan TPA tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga diharapkan JICA dapat membantu, baik secara teknis maupun pinjaman.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah analisa dan pembahasan maka penulis akan membahas masalah yang akan penulis bahas yaitu, penulis akan membahas

mengenai peranan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) terhadap upaya penanganan sampah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang sudah penulis jabarkan bahwa isu lingkungan merupakan isu penting di dunia internasional dan banyak menjadi fokus setiap negara saat ini. Bahwa sampah menjadi salah satu penyebab meningkatnya kadar emisi karbon dan menjadi gas rumah kaca. Seharusnya sampah tersebut bisa dijadikan energy yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Maka dari diperlukan sebuah pelaksanaan program teknis menangani sampah dengan baik dan seharusnya.

Kerjasama yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Jawa Barat ini berjalan dengan bermacam hambatan sehingga dalam setiap program kerjasamanya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kerjasama pengelolaan sampah dan perancangan pembangunan TPA antara Indonesia dengan JICA ini merupakan program pertama yang dijalankan keduanya. Penulis membatasi rentan waktu yang akan diteliti yakni, 2012. Proyek bantuan yang ditawarkan oleh JICA kepada Pemerintah Indonesia melalui KLHK khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya mengenai TPA sistem pengelolaan sampah yang terpadu dengan 3R tetapi juga merancang pembangunan TPA yang sesuai standar sehingga tidak ada kerusakan lingkungan di sekitarnya..

Berdasarkan batasan tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan dasar analisa pembahasan ini:

Bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dalam sistem pengelolaan sampah dan perancangan pembangunan TPA di Jawa Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

Menjelaskan kerjasama antara Indonesia dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dalam sistem pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi penulis
memberikan kontribusi kerjasama antara JICA sebagai non – state actor dengan Indonesia sebagai state actor.
- b. Bagi pembaca
Dapat menjadi refresni bagi penulis lain yang akan meniliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kerjasama Indonesia dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dalam menangani permasalahan sampah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik maka harus diuraikan secara sistematis. Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan sebuah sistematika penulisan yang tersusun dan teratur yang terbagi dalam bab – bab yang saling saling berangkaian serta berhubungan satu sama lain. Penulis membagi beberapa bab dalam penulisan skripsi ini. Tujuan diadakannya sistematika yaitu agar terhindar dari penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan, masing – masing bab saling berhubungan dan tersusun secara berurut yakni dari hal yang paling umum ke hal yang lebih khusus, agar analisa terhadap skripsi ini dapat mudah dipahami.

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian – bagian yang terdiri dari bab dan sub – bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam 5 bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bagian awal akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, definisi operasional, asumsi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan penelitian – penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan penulis yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknis analisis data dan juga teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV WASTE MANAGEMENT DI INDONESIA, PERMASALAHAN SAMPAH DI JAWA BARAT

Di Bab IV akan menjelaskan isu *waste management*. Membahas kepentingan Indonesia tentang waste management, penerapan *waste management* di Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas permasalahan sampah di Jawa Barat.

**Bab V JICA, KERJASAMA JICA DAN INDONESIA DALAM WASTE
MANAGEMENT DI JAWA BARAT**

Bab V ini akan berisikan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam *waste management* di Jawa Barat dengan program perancangan pembangunan TPA

Bab VI PENUTUP

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian penulis.